KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU Narkotika Akan Diprioritaskan
Tanggal : Selasa, 06 Maret 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Revisi UU Narkotika Akan Diprioritaskan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly berjanji untuk segera menyelesaikan penyusunan draf revisi Undang–Undang Narkotika. DPR pun siap mengambil alih pembuatan draf revisi jika pemerintah dinilai masih lambat.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi darurat narkotika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di Tanah Air. Terkait dengan hal itu, pemerintah berupaya mempercepat penyusunan draf revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertunda karena pembahasan beberapa regulasi lain.

Dalam draf revisi itu, pemerintah akan menggunakan pendekatan dan paradigma baru dalam perang melawan narkoba. Pasal-pasal yang lebih tegas akan dimasukkan dalam draf revisi demi menanggulangi maraknya peredaran narkoba.

Di sisi lain, pemerintah merasa optimalisasi rehabilitasi pencandu serta program pendidikan dan pencegahan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba juga harus dijalankan secara sinergis dengan penegakan hukum.

"Saya akan mengingatkan lagi pihak-pihak yang mengerjakan revisi UU Narkotika," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yassona H Laoly, Senin (5/3), di Jakarta.

Secara terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga menyatakan, lembaganya siap berjihad melawan narkoba. DPR, tambahnya, akan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Narkotika. Namun, jika pemerintah tidak kunjung menyelesaikannya, DPR akan mengambil inisiatif untuk merevisi UU tersebut dan akan menjadikannya sebagai usul inisiatif DPR.

"Revisi UU Narkotika penting karena aturan yang ada sekarang tak lagi bisa memberikan efek jera," kata Bambang dalam pidato pembukaan masa persidangan DPR pada Rapat Paripurna DPR yang dihadiri 295 anggota dari total 560 anggota DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Undang Dubes China

Menurut Bambang, pimpinan DPR akan meminta Badan Legislasi DPR untuk mengkaji beberapa ketentuan penting. Sejumlah ketentuan yang perlu dikaji dalam UU Narkotika itu antara lain percepatan eksekusi mati bandar narkoba. Selain itu, aturan perlunya pengguna narkoba direhabilitasi dipikirkan sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk memeras.

Tak hanya itu, Bambang mengatakan, pimpinan DPR pun meminta Komisi I DPR agar segera mengundang Duta Besar China untuk Indonesia. Ini penting untuk menjelaskan tentang masifnya penyelundupan narkoba dari China ke Indonesia.

Sebelumnya disebutkan, dalam dua bulan terakhir, aparat keamanan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan hampir 3 ton sabu ke Indonesia.

Kondisi ini tak hanya mengundang perhatian Ketua DPR, tetapi juga sejumlah anggota DPR lain, seperti anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Henry Yosodiningrat, dan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR, Reni Marlinawati. "Saya mendukung jika UU Narkotika segera dibahas. Kita perlu pastikan Indonesia bebas narkoba," ujar Reni.

Sementara itu, pemerintah memandang perang melawan narkoba tidak cukup dilakukan hanya melalui upaya yang bersifat punitif. Pengurangan jumlah pemakai melalui kampanye antinarkoba besar-besaran harus disusun sehingga pasar narkoba di dalam negeri menyusut. Pada akhirnya, hal ini nantinya memangkas masuknya narkoba ke Indonesia.

"Kalau mau serius memberantas narkoba, tidak bisa hanya menggantungkan pada penindakan semata, tetapi juga pencegahan dan pendidikan. Jangan sampai pasar narkoba di Indonesia ini terus membesar. Apabila pasar atau jumlah mereka yang menjadi pemakai narkoba tetap besar, hukum ekonomilah yang berlaku, yakni *supply* dan *demand*. Sepanjang masih ada permintaan, bandar narkoba internasional akan melakukan segala cara memasukkan barangnya ke sini," kata Yasonna.

Yasonna juga akan bertemu dan berkoordinasi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Heru Winarko guna membahas hal-hal krusial terkait dengan pemberantasan narkoba. (REK/APA/AGE)